

## **Akuntansi Persediaan Barang Atau Perlengkapan Berdasarkan PSAP Nomor 05 Pada Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan**

*Accounting for Inventory of Goods or Supplies Based on PSAP Number 05 at the South Bolaang Mongondow Police Office*

**Christy Patricia Lumenta<sup>1</sup>, Jenny Morasa<sup>2</sup>, Sherly Pinatik<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

Email: [christylumenta064@student.unsrat.ac.id](mailto:christylumenta064@student.unsrat.ac.id);

**Abstrak:** Persediaan adalah aset lancar yang berupa barang atau perlengkapan untuk menunjang kegiatan operasional dalam instansi pemerintahan. Sistem pencatatan persediaan yang baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dapat meningkatkan kinerja pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Akuntansi Persediaan barang atau perlengkapan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05, yang diterapkan pada Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi persediaan yang ada pada Polres Bolmong selatan sebagian besar sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.05.

**Kata kunci:** *akuntansi persediaan barang atau perlengkapan, PSAP Nomor 05*

**Abstract:** Inventories are current assets in the form of goods or equipment to support operational activities in government agencies. A good inventory recording system and in accordance with applicable accounting principles can improve the performance of services provided by government agencies. This study aims to determine the suitability of Accounting for goods or equipment based on Government Accounting Standards Statement (PSAP) Number 05, which is applied to the South Bolaang Mongondow Police Office. Data collection techniques used are interviews and observations. The results showed that the inventory accounting in the southern Bolmong Police was mostly in accordance with the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) No. 05.

**Keyword :** *accounting for goods or equipment inventory, PSAP number 05*

### **PENDAHULUAN**

Reformasi di bidang keuangan negara telah memberikan perubahan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk reformasi keuangan negara adalah dengan dikeluarkannya tiga Undang-Undang (UU), yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan (A'yun, 2019:1)

Upaya pemerintah dalam mencapai sistem penataan pemerintahan yang baik (*good governance*) dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan karena adanya tuntutan publik agar Pemerintah mengelola secara profesional dan efisien dengan membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas serta dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengganti

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun/12005/1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan APBD dalam pemerintah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi (Alfons, 2016:1)

Pada peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 juga mengatur tentang administrasi pertanggung jawaban keuangan dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan administrasi pertanggung jawaban keuangan yang akuntabel dan transparan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah di dalamnya terdapat Pernyataan No.05 membahas mengenai Akuntansi Persediaan. Adapun persediaan yang dimaksud yaitu persediaan berupa barang atau perlengkapan untuk dipakai pada kegiatan operasional dalam instansi pemerintah. Persediaan sebagai aset lancar dianggap sebagai bahan habis pakai yang bersifat sulit untuk dipertanggung jawabkan.

Pada instansi pemerintahan seperti pada Kantor Kepolisian Resor Bolmong Selatan persediaan barang atau perlengkapan merupakan salah satu bagian yang penting untuk menjalankan kegiatan operasional dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Aktivitas di lingkungan instansi pemerintahan juga terganggu tanpa adanya persediaan, karena persediaan juga meliputi barang-barang yang mendukung kegiatan administrasidan kantor di instansi pemerintahan seperti pada Polres Bolsel. Seperti yang terdapat juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang pengelolaan Barang Persediaan dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas pentingnya pengelolaan persediaan dengan baik dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Tanpa adanya persediaan, Kantor Polres Bolsel akan sulit melayani masyarakat. Aktivitas di lingkungan instansi pemerintahan juga terganggu tanpa adanya persediaan. Dengan melihat pentingnya persediaan barang atau perlengkapan pada Polres Bolsel maka dibutuhkan juga sistem pencatatan yang baik dan sesuai dengan PSAP No.05. Perlakuan akuntansi ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam perekapan persediaan-persediaan yang ada karena mengingat juga Polres Bolsel merupakan Polres yang baru dibentuk maka peneliti tertarik melakukan penelitian pada Polres Bolsel ini dengan mengangkat judul “Akuntansi persediaan barang atau perlengkapan berdasarkan PSAP No.05 pada Kantor Kepolisian Resor Bolmong Selatan”

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah akuntansi persediaan barang atau perlengkapan pada kantor kepolisian resor Bolaang Mongondow Selatan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 05

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sector publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, di mana sumber daya ekonomi organisasi sector public dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba). (Sarwenda B.2018:1)

### **2.2 Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi Pemerintahan merupakan aspek akuntansi yang memiliki keterkaitan dengan suatu institusi pemerintahan yang tujuannya tidak untuk mencari laba. Walaupun seperti yang diketahui sebuah institusi pemerintah berukuran besar, namun dalam perusahaan ia termasuk dalam golongan lembaga mikro. (Kustandi 2015:1). Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. (Hasanah dan

Fauzi. 2017:1) Perbedaan utama antara Akuntansi pemerintahan dengan Akuntansi perusahaan terletak pada fungsinya. Fungsi akuntansi pemerintahan biasanya lebih ditekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran Negara serta pelaporan realisasinya. Karena fungsi yang demikian itu, maka Akuntansi pemerintahan kadang-kadang disebut juga sebagai akuntansi anggaran. Perlu ditambahkan, sebagaimana didalam akuntansi perusahaan, didalam akuntansi pemerintahan juga terdapat unsure akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. (A'yun. 2019:31)

### 2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 9 menyatakan bahwa dengan diberlakukannya peraturan ini maka peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi Pemerintahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, peraturan pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan telah menggantikan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbunyi "Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah perubahan. Dengan adanya tuntutan masyarakat menyebabkan akuntansi pemerintahan menjadi penting. Semakin besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai wujud transparansi keuangan dalam pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu Standar Akuntansi Pemerintahan juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut (A'yun 2019:32)

### 2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akural

Peraturan pemerintah Nomor 71 2010 pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akreal untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (PP No.71 tahun 2010). SAP berbasis akrual diterapkan dalam lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010). (Hasanah dan Fauzi.2017:14)

### 2.5 Akuntansi Persediaan

Definisi persediaan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akreal (PSAP BA) No. 5 Paragraf 4 PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Adapun definisi persediaan berdasarkan PSAP No.05 terdapat juga barang-barang untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, namun pada objek penelitian di Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan tidak ada barang-barang untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

#### 1. Pengakuan Persediaan

Berdasarkan PSAP No.05 paragraf 13 dan 14 persediaan diakui :

- a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
- b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah
- c) Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik

#### 2. Pengukuran Persediaan

Berdasarkan PSAP No.05 Paragraf 14 dan 15 Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

### 3. Beban Persediaan

Berdasarkan PSAP No.05 paragraf 22 sampai 25 :

- a) Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan
- b) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional
- c) Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan
- d) Dalam hal persediaan dicatat secara periodik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan

### 4. Pengungkapan Persediaan

Berdasarkan PSAP No.05 paragraf 26 Laporan keuangan mengungkapkan:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti pada Kantor Kepolisian Resor Bolmong Selatan terletak di Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Molibagu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

### 3.2 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data Kualitatif, yaitu dengan turun lapangan secara langsung. Sumber data yang diterapkan penelitian ini yaitu itu data sekunder data yang telah tersedia dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, peneliti memperoleh dokumen berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan akuntansi persediaan dan juga melalui wawancara, dengan cara mewawancarai secara langsung pihak yang ada pada Kantor Kepolisian Resor Bolmong Selatan

### 3.3 Metode dan Proses Analisis Data

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan membandingkan penerapan akuntansi persediaan pada Kantor Kepolisian Resor Bolmong Selatan dengan PSAP No.05. Proses analisis data yaitu : (1) Melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada Kantor Kepolisian Resor Bolmong Selatan. (2) Mengumpulkan data berdasarkan gambar, foto dan dokumen yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis. (3) Menganalisis data-data yang sudah didapatkan menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengetahui kesesuaian Akuntansi Persediaan Barang atau Perlengkapan berdasarkan PSAP No.05 pada Kantor Polres Bolmong Selatan. (4) Setelah melakukan analisis, maka akan memperoleh hasil penelitian dan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka akan ditarik kesimpulan dan akan diberikan saran

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## **4.1 Hasil**

### **4.1.1 Klasifikasi Persediaan**

Berdasarkan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan klasifikasi persediaan yang ada di Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan terbagi atas dua, yaitu : 1. Persediaan Barang Habis. 2. Persediaan Barang tidak habis pakai.

### **4.1.2 Pengakuan Persediaan**

Pengakuan persediaan yang ada pada Kantor Kepolisian Resor Bolmong Selatan langsung diakui pada saat persediaan barang atau perlengkapan diterima atau hak kepemilikannya berpindah sesuai dengan tanggal pencatatan masuknya barang dan ditandai dengan faktur penyerahan barang setelah barang diterima. Adapun dokumen lainnya yaitu kwitansi/bukti pembayaran. Dan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal hal itu ditandai dengan daftar rincian ATK yang tertera jumlah nilai harga perolehan dari persediaan tersebut

### **4.1.3 Pengukuran Persediaan**

Pengukuran persediaan yang ada pada Kantor Kepolisian Resor Bolmong Selatan dicatat sebesar harga beli. Harga beli diketahui merupakan bagian dari harga perolehan. Untuk harga pokok produksi pada Kantor Kepolisian Resor Bolmong Selatan sendiri tidak ada karena Kantor Kepolisian Resor Bolmong Selatan tidak memproduksi barang, dan untuk barang yang diperoleh dengan hasil donasi sampai dengan desember 2020 Kantor Kepolisian Resor Bolmong Selatan tidak memperoleh barang dengan hasil donasi.

### **4.1.4 Beban Persediaan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui beberapa data yang diperoleh serta didukung dengan wawancara kepada anggota Kepolisian Polres Bolsel, Kantor Kepolisian Resor Bolmong Selatan melakukan pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Pencatatan secara periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak memperbarui jumlah persediaan, pengukuran beban persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

### **4.1.5 Pengungkapan dan Penyajian Persediaan**

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan telah mengungkapkan kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Untuk Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan untuk proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat tidak diungkapkan oleh Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan karena tidak ada data- datapersediaan yang sesuai dengan kriteria tersebut. Untuk pengungkapan persediaan dalam kondisi rusak dan kondisi usang tidak diungkapkan karena tidak ditemukannya persediaan dalam kondisi tersebut. Untuk penyajian persediaan, persediaan disajikan dineraca pada bagian aset lancar. Untuk menyajikan persediaan dineraca, satuan kerja pada Kantor Polres Bolsel melaksanakan inventarisasi fisik persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

### **4.1.6 Pelaporan Persediaan**

Berdasarkan penelitian pada Kantor Polres Bolsel didapati bahwa dalam pelaporan persediaan Kantor Polres Bolsel lebih menekankan pada hasil inventarisasi fisik atau laporan persediaan pada akhir periode. Agar supaya menurunkan resiko terjadinya kesalahan pada rekapan dalam menyajikan laporan persediaan yang disajikan dalam neraca.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengakuan Persediaan

Dalam pembelian persediaan barang atau perlengkapan pada Kantor Polres Bolsel terlebih dahulu dilakukan perencanaan kebutuhan anggaran dalam hal ini anggaran untuk pembelian persediaan. Setelah dilakukan perencanaan, maka diajukan nota dinas kepada Kapolres. Setelah melakukan perencanaan, maka tahap selanjutnya dilakukan pengadaan persediaan barang atau perlengkapan. Kantor Polres Bolsel mengadakan kontrak kerja dengan pihak swasta. Selanjutnya pada proses transaksi dilakukan pada saat barang diterima dan untuk menandakan bahwa persediaan barang sudah diterima ditandai dengan dokumen faktur. Maka dalam hal pengakuan persediaan pada Kantor Polres Bolsel diakui pada saat barang atau perlengkapan benar-benar diterima beserta dengan kelengkapan dokumen-dokumennya yaitu dalam hal ini adalah dokumen faktur dan kwitansi/bukti pembayaran dan persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal seperti yang tertera dalam faktur pembelian ATK yaitu terdapat elemen harga barang persediaan. Maka untuk pengakuan persediaan Kantor Polres Bolsel telah sesuai dengan PSAP Nomor 05.

### 4.2.2 Pengukuran Persediaan

Pengukuran persediaan yang ada pada Kantor Kepolisian Resor Bolmong Selatan pada poin pertama pengukuran persediaan pada Kantor Kepolisian Resor Bolmong Selatan disajikan sebesar biaya perolehan, apabila persediaan didapat dengan cara melakukan pembelian sendiri hal ini ditandai dengan data yang ada pada daftar rincian barang persediaan (ATK) Kantor Polres Bolsel yang didalamnya tertera jumlah harga perolehan dari masing-masing barang yang diperoleh dengan cara pembelian, sehingga dari daftar rincian ATK akan diperoleh nilai persediaannya.

**Tabel 1. Daftar Rincian Persediaan ATK**

| Banyaknya | Nama barang              | Harga satuan | Jumlah       |
|-----------|--------------------------|--------------|--------------|
| 50 RIM    | Kertas hvs f4 70 gsm     | Rp 50,000    | Rp 2,500,000 |
| 50 RIM    | Kertas hvs a4 70 gsm     | Rp 48,000    | Rp 2,400,000 |
| 15 PAK    | Map diamond kuning       | Rp 165,000   | Rp 2,475,000 |
| 15 PAK    | Map diamond snarhekter   | Rp 95,000    | Rp 1,425,000 |
| 10 DUS    | Amplop coklat besar      | Rp 16,000    | Rp 160,000   |
| 13 BUAH   | Sapu ruangan merk nagata | Rp 35,000    | Rp 455,000   |
| 13 BUAH   | Tempat sampah            | Rp 50,000    | Rp 650,000   |
| 13 BUAH   | Sket/angkat sampah       | Rp 20,000    | Rp 260,000   |
| 13 BUAH   | Alat pel merk lion star  | Rp 150,000   | Rp 1,950,000 |
| 1 BUAH    | Alat pemotong kertas     | Rp 350,000   | Rp 350,000   |
| 2 BUAH    | Hekter besar jilid joyko | Rp 491,000   | Rp 982,000   |
| 100 BUAH  | Buku album merk kiky     | Rp 25,000    | Rp 2,500,000 |
| 30 BUAH   | Buku ekspedisi merk kiky | Rp 30,000    | Rp 900,000   |
| 4 PAK     | Kertas cover merah       | Rp 52,000    | Rp 208,000   |
| 4 PAK     | Plastik cover transparan | Rp 35,000    | Rp 140,000   |
| 6 PAK     | Map diamond merah        | Rp 165,000   | Rp 990,000   |

|              |                           |            |               |
|--------------|---------------------------|------------|---------------|
| 15 ROLL      | Lakban hitam besar        | Rp 16,500  | Rp 247,500    |
| 15 ROLL      | Lakban hitam sedang       | Rp 14,500  | Rp 217,500    |
| 15 ROLL      | Lakban hitam kecil        | Rp 11,000  | Rp 165,000    |
| 10 DUS       | Peluru hektar besar jilid | Rp 35,000  | Rp 350,000    |
| 15 BUAH      | Pisau cutter besar        | Rp 25,000  | Rp 375,000    |
| 10 DUS       | Amplop putih              | Rp 30,000  | Rp 300,000    |
| 10 BUAH      | Hektar No.10 joyko        | Rp 8,000   | Rp 80,000     |
| 10 BUAH      | Hektar No.03 joyko        | Rp 22,000  | Rp 220,000    |
| 10 BUAH      | Mistar besi panjang       | Rp 14,500  | Rp 145,000    |
| 40 BUAH      | Map odner papeo           | Rp 21,000  | Rp 840,000    |
| 40 BUAH      | Map odner gema            | Rp 25,000  | Rp 1,000,000  |
| 10 SET       | Tinta print epon warna    | Rp 397,500 | Rp 3,975,000  |
| 10 BOTOL     | Tinta print epon hitam    | Rp 140,000 | Rp 1,400,000  |
| 15 DUS       | Binder clips No.260       | Rp 20,000  | Rp 300,000    |
| 15 DUS       | Binder clips No.200       | Rp 13,000  | Rp 195,000    |
| 15 DUS       | Peluru hektar sedang      | Rp 3.500   | Rp 52,000     |
| 10 DUS       | Trigonal clips 60pcs      | Rp 2,250   | Rp 22,500     |
| 5 BUAH       | Cap kepala                | Rp 100,000 | Rp 500,000    |
| 5 BUAH       | Cap staf                  | Rp 100,000 | Rp 500,000    |
| 5 BUAH       | Bantal cap joyko          | Rp 15,000  | Rp 75,000     |
| 5 BUAH       | Pelubang kertas besar     | Rp 79,000  | Rp 395,000    |
| Jumlah Total |                           |            | Rp 29,700,000 |

Sumber: Daftar Rincian ATK Kantor Polres Bolsel

Daftar rincian ini adalah biaya perolehan yang merupakan harga pembelian persediaan barang. Untuk biaya perolehannya hanya disajikan sebesar biaya pembelian, karena tidak terdapat biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya sebab barang persediaan tersebut diambil atau dijemput langsung oleh personil Polres Bolsel yang ditugaskan.

#### 4.2.3 Beban Persediaan

Menurut PSAP No.05 mengenai beban persediaan, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Kantor Polres Bolsel dalam hal pencatatan persediaan yaitu dicatat sebesar pemakaian persediaan, maka dalam hal ini telah sesuai dengan PSAP Nomor 05. Dalam PSAP Nomor 05 mengenai pencatatan persediaan menggunakan dua metode yakni metode perpetual dan metode periodik. Dalam hal pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan jumlah unit dipakai dikalikan ilai rupiah perunit, dalam pencatatan secara periodik maka pengukuran persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pencatatan persediaan Kantor Polres Bolsel menggunakan metode pencatatan secara

periodik yaitu pemakaian atau beban persediaan dihitung berdasarkan dengan inventarisasi fisik. Maka dalam hal beban persediaan Kantor Polres Bolsel telah sesuai dengan PSAP Nomor 05.

#### 4.2.4 Pengungkapan dan Penyajian Persediaan

Berdasarkan PSAP No.05 mengenai pengungkapan persediaan terdapat tiga poin yaitu: 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan 2. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan 3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Untuk poin pertama Kantor Polres Bonsel sudah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dipakai dalam pengukuran persediaan pada akhir periode akuntansi. Untuk poin kedua Kantor Polres Bonsel tidak mengungkapkan laporan tersebut karena tidak adanya data yang sesuai dengan kriteria tersebut. Untuk poin ketiga Kantor Polres Bonsel dalam menyajikan laporan persediaan tidak ditemukan persediaan dalam kondisi rusak maupun kondisi usang. Pada poin pertama telah sesuai dengan PSAP No.05, maka untuk poin kedua dan ketiga Kantor Polres Bonsel tidak menyalahi PSAP No.05 dalam hal pengungkapan.

#### **4.2.5 Akuntansi Persediaan PSAP Nomor 05**

Berdasarkan dengan hasil penelitian pada Kantor Polres Bonsel perlakuan Akuntansi persediaan mulai dari pengakuan persediaan. Kantor Polres Bonsel dalam memperoleh persediaan maka dilakukan pemesanan pada Persediaan dengan pihak swasta yang telah memiliki kontrak kerja dengan Kantor Polres Bonsel. Untuk transaksi pembayaran, persediaan diterima dahulu baru dilakukan pembayaran ditandai dengan kwitansi, setelah dilakukan proses transaksi terhadap persediaan maka persediaan tersebut telah diakui sebagai persediaan Kantor Polres Bolmong Selatan dan dicatat dalam kartu persediaan barang. Pada pengukuran persediaan yaitu persediaan disajikan sebesar biaya perolehan dan diperoleh dengan cara melakukan pembelian terhadap pihak swasta yang berada di Kotamobagu. Selanjutnya untuk perlakuan akuntansi persediaan dalam hal beban persediaan, Kantor Polres Bonsel mencatat beban persediaan sesuai dengan pemakaian persediaan untuk disajikan dalam laporan operasional. Dalam hal pencatatan pemakaian akuntansi persediaan, Kantor Polres Bonsel menggunakan metode periodik yaitu pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik pada akhir periode. Selanjutnya dalam perlakuan akuntansi terhadap persediaan dalam hal pengungkapan dan penyajian persediaan, Kantor Polres Bonsel sudah mengungkapkan kebijakan persediaan akuntansi yang dipakai dalam pengukuran persediaan pada akhir periode akuntansi. Dan dalam penyajian persediaan, Kantor Polres Bonsel persediaan disajikan dalam neraca dibagian aset lancar dan dalam rangka penyajian persediaan pada neraca maka satuan kerja Polres Bonsel ditugaskan untuk melakukan inventarisasi fisik (stock opname).

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengakuan persediaan pada Kepolisian Resor Bolmong Selatan sudah sesuai dengan PSAP No.05 dimana persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai dan biaya yang dapat diukur dengan andal serta persediaan diakui pada saat hak atau kepemilikannya berpindah. Bila perlu, di bagian akhir kesimpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut.
2. Pengukuran persediaan pada Kepolisian Resor Bolmong Selatan sudah sesuai dengan PSAP No.05 dimana pada pengukuran persediaan dicatat sebesar harga beli
3. Beban persediaan pada Kantor Kepolisian Resor Bolmong Selatan sudah sesuai dengan PSAP No.05 yaitu dicatat sebesar pemakaian persediaan dan disajikan pada laporan operasional dan untuk pencatatan beban persediaan menggunakan pencatatan periodic
4. Pengungkapan persediaan pada Kantor Kepolisian Resor Bolmong untuk poin pertama dalam pengungkapan persediaan telah sesuai dengan PSAP No.05, untuk poin kedua Kantor Polres Bolmong

Selatan Selatan tidak mempunyai barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, untuk poin ketiga tidak ditemukan persediaan dalam kondisi rusak dan kondisi usang.

5. Penyajian persediaan sudah sesuai dengan PSAP No.05, dimana penyajian laporan persediaan pada Kantor Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada neraca dibagian aset lancar

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada kantor Kepolisian Resor Bolmong Selatan :

1. Untuk lebih menyempurnakan penertiban pencatatan akuntansi persediaan sesuai dengan PSAP 05, disarankan untuk Kantor Kepolisian Bolmong Selatan didalam pemakaian aset lancar dapat dibuatkan bukti penerimaan dan pemakaian dengan berkoordinasi dengan bagian persediaan agar setiap pemakaian aset lancar dapat terkontrol dengan baik untuk memenuhi PSAP No.05.
2. Kantor Polres Bolmong Selatan harus terus mempertahankan transparansi beserta dengan akuntabilitas dalam menghasilkan laporan keuangan, lebih dikhususkan untuk semua transaksi-transaksi mengenai persediaan karena Akuntansi persediaan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang kegiatan oprasional Kantor Polres Bolaang Mongondow Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, W. M. A. (2016). Analisis Sistem dan prosedur Akuntansi Aset di Dinas Perhubungan Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4) : 1
- Arnita, Kustandi. 2015. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat
- A'yun, A. D. Q. (2019). Perlakuan Akuntansi Persediaan Sesuai Dengan Akuntansi Persediaan Pada Dinas Kota Batu. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15461>
- Biduri, S. 2018. Buku Ajar : Akuntansi Sektor Publik.
- Hasanah, Nuramalia dan Fauzi, Achmad. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : In Media  
[http://sipeg.unj.ac.id/repository/upload/buku/AKUNTANASI\\_PEMERINTAHAN.pdf](http://sipeg.unj.ac.id/repository/upload/buku/AKUNTANASI_PEMERINTAHAN.pdf)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Administarsi Pertanggungjawaban Keuangan Di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Persediaan Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 71 tahun 2010 Lampiran II Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010. Perraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan No.05 tentang Standar Akuntansi Berbasis AkruaI